

**KONTRIBUSI PENDIDIKAN GEOGRAFI DALAM
MENGEMBANGKAN
MODAL SOSIAL UNTUK MENUJU KEUNGGULAN
BERBANGSA DAN BERNEGARA**

Oleh

Enok Maryani *)

I. Pendahuluan

Saat ini, dalam keseharian kita banyak disuguhkan berbagai informasi yang membuat hati miris dan bertanya-tanya ”mengapa itu bisa terjadi?; Bagaimana dan apa yang salah?; faktor apa yang menyebabkannya?”. Kasus-kasus lokal dan individual seperti pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, incest, perebutan warisan yang berujung dengan pembunuhan. Kasus regional yang berupa kemiskinan, sampah, kebakaran hutan, tawuran antarpelajar, banjir dan longsor. Kasus nasional berupa korupsi, penyalahgunaan wewenang, penyelundupan barang/BBM, baku hantan dikalangan anggota MPR, narkoba dan sebagainya. Kasus-kasus lokal dan regional, berkembang menjadi masalah besar yang memerlukan campur tangan lembaga yang lebih tinggi. Masalah pun menjadi semakin kompleks dan luas, menjadi persoalan bangsa dan negara, apalagi diberi sentuhan nuansa politik.

Untuk mencari solusi dari setiap permasalahan, memang kita harus melihat latarbelakang munculnya masalah, dan lingkungan bagaimana yang dapat meredam dan sekaligus menyuburkan masalah tersebut. Bagaimana peran aturan dan aparat pengontrol, sudahkah berfungsi dengan baik?, dan yang lebih penting lagi, sejauhmana setiap orang yang diberi amanah, baik amanah sebagai makhluk Tuhan, anggota masyarakat maupun sebagai anggota sebuah institusi, mampu memahami dan merealisasikan tanggungjawab dengan baik, konsekuen dan konsisten.

Manusia selaku individu, hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat, terikat pada nilai dan norma untuk mencapai tujuan bersama.

*) Dr. Enok Maryani, MS., Dosen Pendidikan Geografi FPIPS UPI Bandung
Makalah yang disajikan dalam seminar Nasional IPS dui Bandung tanggal 5 Agustus
2006.

Nilai dan norma ditransformasikan dan disosialisasikan sejak bayi hingga dewasa, sehingga menyatu (internalisasi) dan melembaga, membentuk sumber energi kolektif masyarakat, bangsa dan negara.

Energi kolektif masyarakat merupakan pengikat dan pengontrol setiap individu dalam masyarakat, terekspresi dalam perilaku. Bila energi kolektif hancur maka hancur pulalah keharmonisan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam masyarakat. Energi kolektif masyarakat atau social capital, atau social investment harus senantiasa dipelihara, dan ditransformasikan di berbagai institusi yang ada di masyarakat, salah satunya adalah melalui lembaga pendidikan.

Lembaga pendidikan sarat dengan nilai, baik itu pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Pendidikan geografi merupakan salah satu mata ajar yang sarat dengan nilai-nilai kebersamaan sebagai satu kesatuan wilayah (baca Indonesia), memberikan wawasan global dan makna akan pentingnya keberagaman dalam mencapai kemajuan bersama. Dalam makalah ini mencoba dikaji peran modal sosial sebagai perekat kehidupan masyarakat, indikator keunggulan bangsa dan negara serta kontribusi pendidikan geografi dari masa ke masa dalam mengembangkan modal sosial.

2. Modal Sosial Sebagai Perekat Kehidupan Masyarakat

Dalam pandangan ilmu ekonomi, modal adalah segala sesuatu yang dapat menguntungkan atau menghasilkan, modal itu sendiri dapat dibedakan atas (1) modal yang berbetuk material seperti uang, gedung atau barang; (2) modal budaya dalam bentuk kualitas pendidikan; kearifan budaya lokal, dan (3) modal sosial dalam bentuk kebersamaan, kewajiban sosial yang diinstitutionalisasi dalam bentuk kehidupan bersama, peran, wewenang, tanggungjawab, sistem penghargaan dan keterikatan lainnya yang menghasilkan tindakan kolektif.

*) Dr. Enok Maryani, MS., Dosen Pendidikan Geografi FPIPS UPI Bandung
Makalah yang disajikan dalam seminar Nasional IPS dui Bandung tanggal 5 Agustus 2006.

Menurut James Colement (1990) modal sosial merupakan inheren dalam struktur relasi antarindividu. Struktur relasi membentuk jaringan sosial yang menciptakan berbagai ragam kualitas sosial berupa saling percaya, terbuka, kesatuan norma, dan menetapkan berbagai jenis sangsi bagi anggotanya.

Putnam (1995) mengartikan modal sosial sebagai “*features of social organization such as networks, norms, and social trust that facilitate coordination and cooperation for mutual benefit*” . Modal sosial menjadi perekat bagi setiap individu, dalam bentuk norma, kepercayaan dan jaringkerja, sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan, untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial juga dipahami sebagai pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki bersama oleh komunitas, serta pola hubungan yang memungkinkan sekelompok individu melakukan satu kegiatan yang produktif. Hal ini sejalan pula dengan apa yang dikemukakan Bank Dunia (1999) modal sosial lebih diartikan kepada dimensi institusional, hubungan yang tercipta, norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat. Modal sosial pun tidak diartikan hanya sejumlah institusi dan kelompok sosial yang mendukungnya, tapi juga perekat (*social glue*) yang menjaga kesatuan anggota kelompok sebagai suatu kesatuan.

Menurut Lesser (2000), modal sosial ini sangat penting bagi komunitas karena (1) memberikan kemudahan dalam mengakses informasi bagi anggota komunitas, (2) menjadi media *power sharing* atau pembagian kekuasaan dalam komunitas; (3) mengembangkan solidaritas; (4) memungkinkan mobilisasi sumber daya komunitas; (5) memungkinkan pencapaian bersama; dan (6) membentuk perilaku kebersamaan dan berorganisasi komunitas. Modal sosial merupakan suatu komitmen dari setiap individu untuk saling terbuka, saling percaya, memberikan kewenangan bagi setiap orang yang dipilihnya untuk berperan sesuai

*) Dr. Enok Maryani, MS., Dosen Pendidikan Geografi FPIPS UPI Bandung
Makalah yang disajikan dalam seminar Nasional IPS dui Bandung tanggal 5 Agustus 2006.

dengan tanggungjawabnya. Sarana ini menghasilkan rasa kebersamaan, kesetiakawanan, dan sekaligus tanggungjawab akan kemajuan bersama.

Manusia belum disebut manusia yang sebenarnya, bila ia tidak ada dalam suatu masyarakat, karena itu pula maka manusia disebut sebagai makhluk sosial. Manusia pada dasarnya tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya dengan baik tanpa hidup bermasyarakat. Sejak lahir, manusia membutuhkan pertolongan manusia lain, sampai dewasa dan meninggal (dan dikubur), ia pun tetap membutuhkan manusia lain. Kemandirian manusia tidak diartikan sebagai hidup sendiri secara tunggal, tapi hidup harmonis dan adaptif dalam tatanan kehidupan bersama. Seperti yang dikemukakan oleh Fairchild (1980) masyarakat merujuk pada kelompok manusia yang memadukan diri, berlandaskan pada kepentingan bersama, ketahanan dan kekekalan/kesinambungan.

Kebersamaan, solideritas, toleransi, semangat bekerjasama, kemampuan berempati, merupakan modal sosial yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Hilangnya modal sosial tersebut dapat dipastikan kesatuan masyarakat, bangsa dan negara akan terancam, atau paling tidak masalah-masalah kolektif akan sulit untuk diselesaikan. Kebersamaan dapat meringankan beban, berbagi pemikiran, sehingga dapat dipastikan semakin kuat modal sosial, semakin tinggi daya tahan, daya juang, dan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Tanpa adanya modal sosial, masyarakat sangat mudah diintervensi bahkan dihancurkan oleh pihak luar.

3. Keunggulan Berbangsa dan Bernegara : Perlukah Modal Sosial ?

Komitmen kebersamaan (integritas) nasional Indonesia sebagai satu bangsa, tercetus pada tanggal 28 Oktober 1928, melalui Sumpah Pemuda yang mengikrarkan bahwa bertanah satu yaitu tumpah darah Indonesia, berbangsa satu yaitu bangsa Indonesia dan berbahasa satu yaitu Bangsa Indonesia. Integritas nasional tercermin pula pada konsep wawasan

*) Dr. Enok Maryani, MS., Dosen Pendidikan Geografi FPIPS UPI Bandung
Makalah yang disajikan dalam seminar Nasional IPS di Bandung tanggal 5 Agustus 2006.

nusantara, sebagai bentuk cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap lingkungannya, yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wawasan Nusantara menunjukkan kebersamaan atau kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya dan kesatuan pertahanan serta keamanan. Perekat ini, menjadi modal dalam mencapai kesejahteraan dalam arti seluas-luasnya.

Membangun bangsa (*nation building*) bukan merupakan perjalanan mudah dan dapat ditempuh dalam waktu yang singkat. Pasang surut kehidupan, tantangan dan masalah telah banyak dilalui, namun panjangnya sejarah itu sendiri merupakan modal dasar untuk memperkuat persatuan. Kesadaran bersama bahwa penjajahan dalam segala bentuk harus dihilangkan. Harkat dan martabat, jati diri harga dan kepribadian bangsa hanya dapat dipelihara bila negara dalam kondisi terlepas dari penjajahan, dan mengatasi penjajahan jelas perlu adanya kesatuan dan kebersamaan.

Keberadaan dan ketahanan suatu negara, menurut Hartshore (Broek dan Webb, 1968) akan banyak tergantung pada sejumlah faktor, antara lain (1) menggelornya kesadaran dan semangat integrasi dari semua kelompok dan wilayah kekuasaannya; (2) kesatuan cita-cita salinf mengenal dan memiliki dianatara semua kelompok yang terorgaisasi ke dalam wilayah politik yang disebut negara; (3) kesatuan cita-cita tadi, harus diterima sebagai kekuatan untuk menghindari peluang-peluang yang mengarah pada konflik; (4) keaadaran akan negara sebagai satu kesatuan harus mengalahkan kepentingan yang bersifat sektoral dan lokalit. Semakin kuat kesatuan /integritas suatu negara semakin kuat negara dalam mengatasi suatu tentangan.

Negara dan bangsa yang unggul adalah bangsa yang mampu mempertahankan jati diri sebagai suatu bangsa yang merdeka dan mandiri. Mempertahankan, meningkatkan modal sosial merupakan langkah yang

*) Dr. Enok Maryani, MS., Dosen Pendidikan Geografi FPIPS UPI Bandung
Makalah yang disajikan dalam seminar Nasional IPS dui Bandung tanggal 5 Agustus
2006.

sangat strategis, mengingat kebersamaan, solideritas, kesetiakawanan, gotongroyong, kepercayaan (trust) menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan setiap sektor pembangunan. Berdasarkan Nakertrans (<http://www.nakertrans.go.id/>) langkah strategis itu perlu diwujudkan dalam pembangunan sosial budaya yang meliputi (1) Terwujudnya struktur sosial, kreativitas budaya dan daya dukung lingkungan yang kondusif bagi pembentukan jati diri bangsa. (2) Tersebarluasnya pola pengembangan modal budaya (*cultural resources*) dan modal sosial (*social capital*) yang dapat ditransformasikan sebagai kekuatan sejarah untuk meningkatkan martabat manusia. (3) Terselenggaranya upaya dan kebijakan penjaminan sosial dan pengelolaan; (4) keragaman budaya yang komprehensif, sistematis dan berkelanjutan untuk memperkokoh integrasi bangsa. (5) Terwujudnya hubungan sosial antarkelompok yang ada dalam masyarakat secara harmonis sehingga memperkokoh kebersamaan dan keIndonesiaan. (6) Terasilitasi tumbuh dan berkembangnya budaya pembelajar (*learning culture*) yang berorientasi iptek dan kesenian sehingga mampu mendukung upaya untuk peningkatan peradaban manusia. (7) Terkelolanya aset budaya yang dapat dijangkau secara adil bagi masyarakat luas sehingga dapat berfungsi sebagai sarana edukasi, rekreasi dan pengembangan kebudayaan secara optimal dan berkelanjutan.

2. Kontribusi Pendidikan Geografi dalam Mengembangkan Modal Sosial

Istilah geografi dikenal dalam berbagai bahasa, seperti *geography* (Inggris), *geographie* (Prancis), *die geographie/die erdkunde* (Jerman), *geografie/ aardrijkskunde* (Belanda) dan *geographike* (Yunani). Di Indonesia sebelum tahun 1974 dikenal dengan istilah Ilmu Bumi. Kata geografi itu sendiri berasal dari Kata Yunani Geographia. Istilah itu muncul

*) Dr. Enok Maryani, MS., Dosen Pendidikan Geografi FPIPS UPI Bandung
Makalah yang disajikan dalam seminar Nasional IPS di Bandung tanggal 5 Agustus 2006.

300 SM, Geo artinya bumi, dan graphia atau graphein adalah gambaran atau mencitrakan.

Sesuai dengan kemajuan cara berfikir manusia dan penajaman makna suatu ilmu, Geografi pun mengalami perkembangan, baik dalam hal teori, pendekatan maupun metode. Kedinamisan suatu ilmu tampak dari berbagai definisi sebagai refleksi dari objek dan hakikat suatu ilmu. Kalau Eratosthenes (276-194 SM) mengartikan geografi sebagai gambaran atau tulisan tentang permukaan bumi (*writing about the earth*), maka Harvey Tahun 1970 dalam bukunya *Explanation geography*, menyatakan bahwa geografi memperhatikan deskripsi dan eksplanasi dari perbedaan wilayah di permukaan bumi. Sementara itu Peet (1998) dalam bukunya *Modern Geographical Thought*, mengartikan geografi sebagai berikut :

Geography is the study of relation between society and the natural environment. Geography look at how society shapes, alters, and increasingly transforms the natural environment, creating humanized forms from stretches of pristine nature, and then sedimenting layers of socialization one within the other, one on top of the other, until a complex nature-social landscape results. Geography also looks at how nature condition society, in some original sense of creating the people and raw materials which forces “work up” into culture, and in an ongoing sense of placing limits and offering material potentials for social processes like economic development.

Geografi melihat hubungan masyarakat dengan lingkungan alamnya. Geografi pun melihat bagaimana masyarakat membentuk lingkungan alam, lingkungan alam membentuk kehidupan bermasyarakat, proses sosial tersebut menghasilkan pembangunan ekonomi.

Secara aplikasi, peran Geografi sebagai suatu ilmu mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi ilmu sesuai pada jamannya. Pada saat sebelum masehi dan abad 15 setelah masehi, keingintahuan tentang bumi baik secara fisik/alam maupun manusia begitu dominan, sehingga saat itu perjalanan dan pengukuran permukaan

*) Dr. Enok Maryani, MS., Dosen Pendidikan Geografi FPIPS UPI Bandung
Makalah yang disajikan dalam seminar Nasional IPS dui Bandung tanggal 5 Agustus 2006.

bumi dilakukan secara intensif. Peranan Historiogeografi dan ilmu alam saat itu sangat penting.

Abad pertengahan (Abad 15 M), ekspansi permukaan bumi melalui perjalanan untuk perdagangan, penjelajahan dan penyebaran agama sangat dominant sehingga dikenal dengan konsep *libenstraum*. Pengetahuan tentang bumi tidak hanya disebarluaskan melalui persekolahan, tapi juga dibentuk perkumpulan-perkumpulan geograf yang bertugas menyebarkan berbagai ekspedisi, penelitian dan mensupport berbagai kebutuhan ekspedisi. Jurnal Geografi pun diterbitkan untuk memperluas dan mensupport penggalan tentang permukaan bumi.

Abad 15 sampai 19, semangat penjelajahan masih tetapi tinggi, namun posisinya bertambah bahkan menjadi semakin strategis. Dipersekolahan geografi diberikan untuk mengenal lebih jauh karakteritik negara sendiri dan negara lain. Tujuan utamanya adalah memperkuat nasionalisme dan *community sentiment*, membangun bahwa kita adalah satu kesatuan. Melalui emosi tersebut, maka semangat juang mempertahankan negara, rasa cinta terhadap tanah air dan semangat perang ditumbuhkembangkan. Jaman *imprealisme*, memperluas jajahan, menyatukan koloni, ide dan gagasan menjadi satu kesatuan sehingga tidak menimbulkan rasa terpisah atau terasing, ditumbuhkembangkan melalui pelajaran Geografi.

Masa setelah Perang Dunia II atau tahun 1950an, membawa perubahan besar dalam geografi baik secara praktis maupun teoritis. Masa itu adalah masa krisis ekonomi, rekonstruksi dan dekolonialisasi, banyak negara yang mengalami perubahan politik dan tata ruang. Masa itu menurut Hartshorne, Geografi menjadi “Broad Propaedeutic Disiplin”. Studi nomotetik dengan pendekatan restruktural keruangan menjadi populer. Metode kuantitatif pun diaplikasikan untuk menganalisis lokasi, pusat-

*) Dr. Enok Maryani, MS., Dosen Pendidikan Geografi FPIPS UPI Bandung
Makalah yang disajikan dalam seminar Nasional IPS di Bandung tanggal 5 Agustus 2006.

pusat pertumbuhan dan pelayanan, serta kiat-kiat memacu pertumbuhan ekonomi dengan pemanfaatan sumberdaya secara optimal..

Posmodernism tahun 1980an, merupakan bentuk perkembangan ilmu geografi lebih lanjut, dari “*post-colonial or feminist positions and poststructural and postmodern nation*” (Peet, 1998). Kajian Geografi abad postmodernism menurut Dear (1988), Geograf dari University of Southern California, adalah sebagai berikut :

1. *cultural landscapes and place making;*
2. *the economic landscapes of post Fordism;*
3. *philosophical and theoretical dispute related to space and problem of language*
4. *problem of representation in geographical writing and cartography;*
5. *politics of posmodernity, feminist geography's discontent with postmodernism questions of post-colonialism;*
6. *the construction of the individual and boundaries of the self (i.e the issue of identity);*
7. *reassertion of natural and environment issues.*

Di sebagian besar negara di dunia, geografi diberikan sebagai diberbagai tingkat pendidikan, mulai dari pendidikan Dasar sampai Perguruan Tinggi. Namun kedudukannya sebagai suatu ilmu beragam, ada yang bersifat mandiri dan ada pula yang di gabung dengan mata pelajaran lain. Ada yang masuk bidang ilmu alam (seperti di UI dan UGM), ada yang sosial (FPIPS seperti di UPI), ilmu kebumihan dan ilmu lingkungan (Graves, 1982). Hal itu dapat dibenarkan mengingat geografi mempelajari alam dan manusia sebagai suatu kesatuan, melalui pendekatan keruangan, kewilayahan dan lingkungan menghasilkan region sebagai objek materialnya.

Secara nasional (Indonesia) tujuan dan fungsi pendidikan adalah:

Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar

*) Dr. Enok Maryani, MS., Dosen Pendidikan Geografi FPIPS UPI Bandung
Makalah yang disajikan dalam seminar Nasional IPS dui Bandung tanggal 5 Agustus 2006.

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab

Tujuan pendidikan tersebut, dijabarkan menjadi tujuan institusional dan tujuan kurikulum. Pelajaran geografi pada jenjang SD dan SLTP terpadu dalam kelompok Ilmu Pengetahuan Sosial, sedangkan di Sekolah Menengah Atas sudah mandiri sebagai satu disiplin ilmu.

Pengetahuan Sosial menjadi salah satu mata pelajaran dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi, mulai dari Kelas I sampai Kelas XI (SMP dan MTs) . Melalui mata pelajaran Pengetahuan Sosial, peserta didik diarahkan, dibimbing, dibantu untuk menjadi warganegara Indonesia dan warga dunia yang baik. Di SMA, Pengetahuan Sosial sudah terpisahkan menjadi bidang ilmu Geografi, Sejarah, dan Ekonomi .Dalam Kurikulum SMA tahun 2004, djelaskan bahwa fungsi pelajaran Geografi adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan pengetahuan tetang pola-pola keruangan dan proses yang berkaitan;
- b. Mengembangkan keterampilan dasar dalam memperoleh data dan infornasi, mengkomunikasikan dan menerapkan pengetahuan geografi;
- c. Menumbuhkan sikap, kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan hidup dan sumber daya serta toleransi terhadap keragaman sosial budaya masyarakat.

Tujuan pembelajaran geografi meliputi ketiga aspek sebagai berikut:

➤ **Pengetahuan:**

- a. Mengembangkan konsep dasar geografi yang berkaitan dengan pola keruangan dan proses-prosesnya.

- b. Mengembangkan pengetahuan sumber daya alam, peluang dan keterbatasannya untuk dimanfaatkan.
- c. Mengembangkan konsep dasar geografi yang berhubungan dengan lingkungan sekitar, dan wilayah negara/dunia.

➤ **Keterampilan:**

- a. Mengembangkan keterampilan mengamati lingkungan fisik, lingkungan sosial dan lingkungan binaan.
- b. Mengembangkan keterampilan mengumpulkan, mencatat data dan informasi yang berkaitan dengan aspek-aspek keruangan.
- c. Mengembangkan keterampilan analisis, sintesis, kecenderungan dan hasil-hasil dari interaksi berbagai gejala geografis.

➤ **Sikap:**

- a. Menumbuhkan kesadaran terhadap perubahan fenomena geografi yang terjadi di lingkungan sekitar.
- b. Mengembangkan sikap melindungi dan tanggung jawab terhadap kualitas lingkungan hidup.
- c. Mengembangkan kepekaan terhadap permasalahan dalam pemanfaatan sumber daya.
- d. Mengembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan sosial dan budaya.
- e. Mewujudkan rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa.

Tujuan tersebut senada dengan Fairgrieve (Grave, 1977) bahwa fungsi geografi adalah “untuk melatih warnanegara yang akan datang agar dapat berimajinasi secara tepat tentang kondisi-kondisi dunia yang lebih

*) Dr. Enok Maryani, MS., Dosen Pendidikan Geografi FPIPS UPI Bandung
Makalah yang disajikan dalam seminar Nasional IPS dui Bandung tanggal 5 Agustus 2006.

besar, dan dengan demikian membantu para siswa untuk memikirkan masalah-masalah yang terdapat di dunia”. Selanjutnya Mackinder (dalam Grave,1977) mengemukakan bahwa geografi sebagai mata pelajaran di sekolah dapat menjembatani kesenjangan antara ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial dan humaniora.

Komite Pendidikan Geografi di Amerika Serikat, yang diketuai oleh Salvator J Natoil, yang merangkap pula sebagai Ketua Asosiasi Geograf Amerika Serikat pada tahun1984, menyatakan bahwa

Every day we make important decisions about our well-being and every day we use geographic knowledge or encounter important geographical influences on our lives. We interpret complicated geographical factors to determine the place where we choose to live- physical characteristics such as climate, topography, and drainage influence where we can build safe, secure, and desirable housing, cultural factors such as quality housing and school, convenient transportation route to work and or leisure- all have a bearing on our quality of life.

Dalam lanjutan tulisannya dinyatakan pula bahwa Keilmuan geografi sangat diperlukan untuk tulisan memahami peristiwa dan masalah krusial seperti pencemaran, ketimpangan sosial, kemiskinan, migrasi, kondisi politik dunia, dan perkembangan negara-negara di dunia. Keberhasilan Amerika dalam memahami masalah domestic dan berpartisipasi dalam setiap peristiwa dunia, kepemimpinan secara global, dan pemahaman fungsi dan peran warganegara adalah melalui pemahaman yang baik tentang region dunia dan masyarakatnya. Semua itu diperoleh dari ilmu Geografi. Kebutaan terhadap geografi (*geographical illiteracy*) harus dihilangkan.

Arvey dan Brian Holly (1981) menyatakan bahwa pembelajaran geografi sangat penting untuk memahami (1) ketimpangan distribusi sumberdaya alam; (2) meluruskan pandangan tentang pengetahuan yang sifatnya pragmatis; (3) advocacy pendekatan deduktif-prediktif; (4) berguna bagi memahami masalah-masalah kemanusiaan di dunia.

*) Dr. Enok Maryani, MS., Dosen Pendidikan Geografi FPIPS UPI Bandung
Makalah yang disajikan dalam seminar Nasional IPS di Bandung tanggal 5 Agustus 2006.

Dalam Kurikulum SMA tahun 2004, dijelaskan bahwa Geografi merupakan ilmu untuk menunjang kehidupan dalam segala perwujudan makna hidup sepanjang hayat, dan dorongan peningkatan kehidupan. Lingkup kajiannya memungkinkan manusia memperoleh jawaban atas pertanyaan dunia sekelilingnya yang menekankan pada aspek-aspek spasial eksistensi manusia, agar manusia memahami karakteristik dunianya dan tempat hidupnya.

Untuk meningkatkan kebermaknaan pembelajaran geografi, UNISCO (1965) memberikan alternatifnya, yaitu

The aim of any selective teaching of Geography must be to concentrate on the problem often crucial, which men need solve so to provide for increasing numbers and a higher standard of living. Any account, however summary, of what must be done to ensure that the world potentials resources are used for improving the condition of existence and the living standard of these indeed shows the immensity of the tasks awaiting the men of tomorrow, who are our pupil to day.

Dengan demikian pengajaran geografi harus berorientasi pada (1) permasalahan yang actual berkembang di sekitar anak didik; (2) kepentingan dan psikologi perkembangan anak didik; (3) peningkatan taraf hidup melalui pengenalan dan pemanfaatan sumberdaya; (4) harus berorientasi ke masa depan, ; (5) memberikan wawasan global, baik dalam bentuk peluang maupun tantangan. <http://www.dikmenum.go.id>

Pengetahuan:

Broek, Jan O.M, and John W. Webb, 1968, *a Geography of Mankind*, New York : Mc Graw Hill Book Company.

Putman, 199 http://www.urdi.org/urdi/Info_URDI

Dear, Michael, and Stephen Flusty, 2002, *The Spaces of Postmodernity*, Oxford : Blackwell Publishers.

Departemen Pendidikan Nasional, Kurikulum 2004 *Standar Kompetensi, Mata Pelajaran Geografi Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah*, Jakarta Tahun 2003.

Fairchild, H.P. 1980, *Dictionary of Sociology*, New York : Adam and Co.

*) Dr. Enok Maryani, MS., Dosen Pendidikan Geografi FPIPS UPI Bandung
Makalah yang disajikan dalam seminar Nasional IPS di Bandung tanggal 5 Agustus 2006.

- Grave, Norman, J, 1977, *Geography in Education*, London : Heineman Educational Book.
- Hagget, Peter, 1972, *Geography : A Modern Synthesis*, New York : Harper and Row
- Hagget, Peter, 1965, *Location Analysis in Human Geography*, London : Edward Arnold.
- Holt-Jensen, 1980, *Geography, Its History and Concepts*, London : Harper and Row Ltd.
- Johnston (ed), 1985, *The Future of Geography*, New York : Methuen.
- Lesser, E. , 2000, *Knowledge and Social Capital: Foundation and Application*, Boston : Butterworth-Heinemann,
- Tri Poetranto, 2002/2003, *Pengembangan Strategi Pertahanan Untuk Penanggulangan Kemungkinan Disintegrasi Bangsa Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional*, <http://buletinlitbang.dephan.go.id>, didownload Tanggal 31 Juli 2005.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
- Unisco, 1965, *Source Book for Geography Teaching*, Paris : Longman, Greend and Co.

*) Dr. Enok Maryani, MS., Dosen Pendidikan Geografi FPIPS UPI Bandung
Makalah yang disajikan dalam seminar Nasional IPS dui Bandung tanggal 5 Agustus 2006.